

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Pada Lima Kabupaten Di Provinsi Riau

Rezi Setiawan¹, Jahrizal², Any Widayatsari³

¹Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

E-mail : rezi.setiawan51@yahoo.com

Article Informations

Received:
(04-11-2024)

Accepted
(14-11-2024)

Available Online :
(01-02-2025)

Keywords

Indeks Pembangunan
Manusia,
Pengangguran, Upah
Minimum,
Kemiskinan.

Abstract

Poverty is a problem that must be resolved immediately by the five regencies in Riau Province. The five regencies with the highest number of poor people include Rokan Hulu Regency, Kampar Regency, Rokan Hilir Regency, Pelalawan Regency, and Meranti Islands Regency. The high number of poor people can slow down the development process in the region. The human development index, unemployment, and minimum wage are believed to be the causes of the high number of poor people in the five districts in Riau Province. The purpose of this study was to analyze the effect of the human development index, unemployment, and minimum wage on poverty in five regions in Riau Province. This research is quantitative and uses a panel data regression method. The selected research model is the Common Effect. The results showed that the human development index has a negative and insignificant effect on poverty in five regencies in Riau Province. Unemployment has a negative and insignificant effect on poverty in five regencies in Riau Province. Minimum wage has a negative and insignificant effect on poverty in five regencies in Riau Province.

Pendahuluan

Kemiskinan adalah kesulitan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan kerap kali muncul menjadi masalah yang sangat serius dan harus diatasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah yang ada di daerah. [Badan Pusat Statistik Provinsi Riau \(2023\)](#) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. [Badan Pusat Statistik Provinsi Riau \(2023\)](#) garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minuman untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Jika pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan maka seseorang disebut dengan penduduk miskin.

Kemiskinan jika dibiarkan tanpa penanganan yang serius maka akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi pemerintah. Oleh sebab itu maka pemerintah harus cepat dalam menangani permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan juga terjadi di provinsi Riau yang terdiri dari 12 Kabupaten dan kota. Kemiskinan yang ada di Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 1. Penduduk Miskin (Kabupaten/Kota) Provinsi Riau Tahun 2022

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin
1	Rokan Hulu	73,81
2	Kampar	63,55
3	Rokan Hilir	49,59
4	Pelalawan	47,84
5	Kepulauan Meranti	45,25
6	Indragiri Hilir	43,22
7	Bengkalis	36,03
8	Pekanbaru	35,96
9	Indragiri Hulu	27,46
10	Kuantan Singingi	26,61
11	Siak	25,71
12	Dumai	10,00

Sumber: [Badan Pusat Statistik Provinsi Riau \(2023\)](#)

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau dapat diketahui bahwa ada lima Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin yang tertinggi yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Rokan Hilir, Pelalawan dan Kepulauan Meranti. Kemiskinan harus segera di atasi agar tidak menghambat proses pembangunan di lima Kabupaten di Provinsi Riau. Adapun jumlah penduduk miskin di lima Kabupaten dari tahun 2018-2022 dapat di lihat sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Pada Lima Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rokan Hulu	72,28	72,21	73,35	74,73	73,81
2	Kampar	69,32	66,81	65,30	68,74	63,55
3	Rokan Hilir	48,92	49,80	48,85	51,97	49,59
4	Pelalawan	44,29	45,98	45,88	49,30	47,48
5	Kepulauan Meranti	51,17	48,89	47,10	48,50	45,25

Sumber : [Badan Pusat Statistik Provinsi Riau \(2020, 2021, 2022, 2023\)](#)

Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa kemiskinan masih begitu besar jumlahnya sehingga pemerintah di lima Kabupaten harus mencari cara untuk mengurangi kemiskinan setiap tahunnya. Kemiskinan terjadi oleh banyak faktor yang mempengaruhinya seperti indeks pembangunan manusia, pengangguran dan upah minimum.

[Badan Pusat Statistik Riau \(2023\)](#) indeks pembangunan manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu: umur panjang, dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan memiliki standar hidup layak. Sementara itu [Leonita & Sari \(2019\)](#) indeks pembangunan manusia menggambarkan pembangunan kualitas hidup manusia sehingga bisa mencapai kehidupan yang layak (di atas garis kemiskinan). [Arifin & Fadlan \(2021\)](#) menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara serta mengkombinasikan bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita. Berikut data mengenai indeks pembangunan manusia pada lima Kabupaten di Riau:

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia pada Lima Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rokan Hulu	69,36	69,93	69,38	69,67	70,31
2	Kampar	72,50	73,15	72,83	73,02	73,84
3	Rokan Hilir	68,73	69,40	69,15	69,34	70,10
4	Pelalawan	71,44	71,85	71,56	72,08	72,93
5	Kepulauan Meranti	65,23	65,93	65,50	65,70	66,52

Sumber: [Badan Pusat Statistik Provinsi Riau \(2022, 2023\)](#)

Berdasarkan di atas maka dapat dilihat indeks pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hulu berfluktuasi dari tahun 2018-2022. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dan menurun di tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021-2022 indeks pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hulu mengalami kenaikan. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kampar berfluktuasi dari tahun 2018-2022. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kampar pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dan menurun di tahun 2020. Sementara itu pada tahun 2021-2022 indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hilir berfluktuasi pada tahun 2018-2022. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dan menurun di tahun 2020. Sementara itu pada tahun 2021-2022 indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pelalawan berfluktuasi dari tahun 2018-2022. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dan menurun di tahun 2020. Pada tahun 2021-2022 indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pelalawan mengalami kenaikan. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti berfluktuasi dari tahun 2018-2022.

Indeks pembangunan manusia di lima Kabupaten yang dapat dilihat pada tabel di atas menjelaskan bagaimana indeks pembangunan manusia setiap Kabupaten selama lima tahun mengalami fluktuasi. Indeks pembangunan manusia yang tinggi memiliki menunjukkan seseorang mempunyai kemampuan untuk bisa hidup dengan baik dan berguna bagi daerah kabupaten ataupun negara. Sebaliknya indeks pembangunan manusia yang rendah menunjukkan seseorang belum memiliki kemampuan untuk bisa hidup dengan baik dan dapat berguna bagi daerah kabupaten ataupun negara. BPS ([Badrudin, 2017](#)) menjelaskan bahwa IPM sebagai manifestasi pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan meningkatkan kemampuan manusia dalam memperluas pilihan-pilihan. IPM yang memasukkan indeks kesehatan dan pendidikan dalam perhitungannya sangat tepat apabila digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat karena kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Meningkatnya nilai IPM menunjukkan bahawa terjadi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas pada suatu daerah ([Muliza et al., 2017](#)).

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada lima kabupaten di Provinsi Riau tahun 2020-2021 indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan akan tetapi kemiskinan di tahun 2020-2021 pada lima Kabupaten di Provinsi Riau juga mengalami peningkatan. Fenomena yang terjadi tersebut tidak sejalan dengan penelitian Rorong (2022) bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan artinya disaat indeks pembangunan manusia meningkat maka kemiskinan akan menurun. Sementara itu Ariza ([Faizin, 2021](#)) tingginya

nilai IPM, dengan kata lain menjadi cerminan atas semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk.

Pengangguran adalah salah satu permasalahan yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan di suatu daerah. [Irandoust \(2023\)](#) menjelaskan bahwa pengangguran merupakan salah satu tantangan ekonomi dan sosial yang paling menantang baik di negara industri maupun negara berkembang. [Rianda \(2020\)](#) pengangguran merupakan masalah sosial yang besar karena mengakibatkan penderitaan besar untuk pekerja yang menganggur yang harus berjuang dengan pendapatan yang berkurang. Menurut [Nurdiana \(2018\)](#) secara garis besar pengangguran dikatakan sebagai penduduk yang tidak dalam status bekerja dan/atau sedang menyiapkan pekerjaan dan/atau menyiapkan usaha dan/atau penduduk yang sudah melamar pekerjaan namun dalam kondisi belum diterima atau belum mendapatkan panggilan. Sedangkan Murni ([Adiyadnya & Swara, 2021](#)) pengangguran adalah orang-orang yang usianya berada dalam usia angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan. Berikut data mengenai pengangguran pada lima Kabupaten di Provinsi Riau:

Tabel 4. Pengangguran pada Lima Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	Pengangguran (Ribu Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rokan Hulu	15,825	15,054	13,958	7,537	12,164
2	Kampar	20,305	21,954	23,911	16,797	14,219
3	Rokan Hilir	18,003	14,632	13,205	9,851	15,073
4	Pelalawan	11,623	11,235	14,223	5,915	6,721
5	Kepulauan Meranti	6,224	5,615	7,475	4,060	5,048

Sumber: [Badan Pusat Statistik Provinsi Riau \(2019, 2020, 2021, 2022,2023\)](#)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat pengangguran di Kabupaten Rokan Hulu berfluktuasi dari tahun 2018-2022. Pengangguran di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018-2021 mengalami penurunan dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Pengangguran di Kabupaten Kampar berfluktuasi dari 2018-2022. Pengangguran di Kabupaten Kampar pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan dan menurun pada tahun 2021-2022. Pengangguran di Kabupaten Rokan Hilir berfluktuasi dari tahun 2018-2022. Pengangguran di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018-2021 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan pada tahun 2022. Pengangguran di Kabupaten Pelalawan berfluktuasi dari tahun 2018-2022. Pengangguran di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 pengangguran di Kabupaten Pelalawan mengalami penurunan dan kembali naik pada tahun 2022. Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti berfluktuasi dari tahun 2018-2022.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada lima Kabupaten di Provinsi Riau tahun 2020-2021 jumlah pengangguran mengalami penurunan akan tetapi kemiskinan di tahun 2020-2021 mengalami peningkatan. Fenomena yang terjadi tersebut bertolak belakang dengan penelitian [Novita & Istiqamah \(2017\)](#) bahwa pengangguran mempengaruhi kemiskinan yang ada di Kabupaten Sambas. Artinya bahwa semakin tinggi pengangguran maka semakin tinggi pula kemiskinan yang terjadi dan sebaliknya semakin rendah pengangguran maka semakin rendah pula kemiskinan.

Menurut [Simanjuntak \(2011\)](#) upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa kerja yang diberikan dalam proses memproduksi barang atau jasa. Peraturan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan Bab V upah minimum bagian kesatu umum pasal 23 ayat 1 upah

minimum merupakan upah bulanan terendah yaitu a) upah tanpa tunjangan atau, b) upah pokok dan tunjangan tetap. Berikut upah minimum pada lima Kabupaten di Provinsi Riau:

Tabel 5. Upah Minimum pada Lima Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	Upah Minimum				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rokan Hulu	2.525.823,52	2.728.647,15	2.960.855,02	2.960.855,02	2.986.863,49
2	Kampar	2.516.638,71	2.718.724,80	2.950.088,28	3.023.840,48	3.047.470,58
3	Rokan Hilir	2.506.141,78	2.707.384,96	2.937.783,42	2.996.539,09	3.009.416,38
4	Pelalawan	2.561.250,65	2.766.919,08	3.002.383,89	3.002.383,89	3.030.598,54
5	Kepulauan Meranti	2.545.505,26	2.749.909,12	2.983.926,39	2.985.000,00	2.985.000,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau (2024)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa Kabupaten Rokan Hulu mengalami kenaikan pada tahun 2018-2020 dan pada tahun 2021 upah minimum tidak berubah masih menggunakan upah minimum di tahun 2020. Sementara itu upah pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Perkembangan upah minimum di Kabupaten Kampar pada tahun 2018-2022 mengalami kenaikan. Perkembangan upah minimum di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018-2022 mengalami kenaikan. Perkembangan upah minimum di Kabupaten Pelalawan mengalami kenaikan pada tahun 2018-2020. Pada tahun 2021 upah minimum tidak mengalami perubahan akan tetapi masih menggunakan upah minimum di tahun 2020. Sedangkan upah minimum tahun 2022 mengalami kenaikan. Perkembangan upah minimum di Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami kenaikan pada tahun 2018-2021. Sedangkan pada tahun 2022 upah minimum tidak mengalami perubahan akan tetapi masih menggunakan upah minimum di tahun sebelumnya.

Menurut [Faizin \(2021\)](#) pemberian upah minimum pada pekerja bertujuan agar para pekerja mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kehidupan yang layak. [Winter \(2022\)](#) menaikkan upah minimum sering dianjurkan dengan alasan bahwa hal itu akan meningkatkan kesejahteraan mereka yang berada di bawah distribusi pendapatan. Berdasarkan fenomena yang terjadi di lima kabupaten di Provinsi Riau tahun 2020-2021 upah minimum tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akan tetapi kemiskinan di tahun 2020-2021 mengalami peningkatan. Fenomena yang terjadi tersebut bertolak belakang dengan penelitian [Brito & Kerstenetzky \(2019\)](#) hasil penelitian menunjukkan bahwa antara tahun 2002 dan 2013, upah minimum berkontribusi terhadap penurunan proporsi penduduk miskin sebesar 38,2% penurunan intensitas kemiskinan sebesar 39,4%, dan penurunan tingkat keparahan kemiskinan sebesar 40,6%.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian ini yaitu kuantitatif. [Sugiyono \(2018\)](#) penelitian kuantitatif adalah penelitian berupa angka-angka dan dianalisis secara statistik. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia, pengangguran dan upah minimum dan variabel terikat yaitu kemiskinan. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif dengan bentuk kausal. Hubungan yang bersifat sebab akibat atau mencari pengaruh dari dua variabel atau lebih. Adapun data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data tahunan dari 2013-2022 yang berasal dari publikasi-publikasi resmi, seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mendatangi instansi atau

pihak terkait untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain itu juga dengan melalui publikasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel. [Algifari \(2021\)](#) analisis regresi data panel adalah alat analisis di dalam statistika inferens (induktif) yang digunakan untuk menganalisis hubungan pengaruh (*casual relationship*) antar variabel. Dalam analisis regresi terdapat variabel yang mempengaruhi disebut (variabel independen) dan yang dipengaruhi disebut (dependen). Dengan demikian analisis regresi digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. [Wahyudi \(2020\)](#) data panel adalah data kombinasi dari data runtut waktu (*times series*) dengan data silang (*cross section*).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Hasil yang uji chow menjelaskan bahwa *F test* dan *Chi-square test* lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (5%) yakni sebesar 0.1972. Pengujian ini menghasilkan kesimpulan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa *Common Effect* lebih baik digunakan dalam regresi panel data.

Hasil Uji Regresi Data Panel

Tabel 6. Uji Statistik

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 05/20/24 Time: 13:09

Sample: 2013 2022

Periods included: 10

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3219715.	1367042.	2.355242	0.0228
X1	-3.462904	1.912312	-1.810846	0.0767
X2	-0.141050	0.294111	-0.479580	0.6338
X3	-0.002128	0.003601	-0.591056	0.5574
R-squared	0.168322	Mean dependent var		724250.2
Adjusted R-squared	0.114082	S.D. dependent var		11464.14
S.E. of regression	10790.42	Akaike info criterion		21.48732
Sum squared resid	5.36E+09	Schwarz criterion		21.64028
Log likelihood	-533.1831	Hannan-Quinn criter.		21.54557
F-statistic	3.103286	Durbin-Watson stat		2.306520
Prob(F-statistic)	0.035619			

Sumber: Data Olahan, 2024

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan pada lima Kabupaten di Provinsi Riau yang mana t-hitung -1.810846 dan probabilitas sebesar 0.0767 >0,05 dan koefisien regresi -3.4629. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah di lima Kabupaten di Provinsi Riau telah berhasil mengurangi

kemiskinan melalui kontribusi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, optimalisasi peran IPM dalam penurunan kemiskinan masih belum tercapai sepenuhnya, sehingga dampak IPM terhadap pengentasan kemiskinan dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui penguatan pendidikan, akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pengawasan program yang berkelanjutan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian [Sari et al., \(2022\)](#) bahwasanya indeks pembangunan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian [Asnita et al., \(2022\)](#) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi, yang artinya secara parsial perubahan indeks pembangunan manusia (IPM) mampu mempengaruhi kemiskinan secara positif dan signifikan.

Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan pada lima Kabupaten di Provinsi Riau yang mana t-hitung sebesar -0.479580 dan probabilitas sebesar $0.6338 > 0,05$ dan koefisien regresi -0.1410 . Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengangguran berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan akan tetapi pengaruh ini tidak cukup kuat secara statistik dalam konteks pada lima Kabupaten di Provinsi Riau. Kondisi ini dapat terjadi karena karakteristik pekerjaan yang tersedia tidak bersifat berkelanjutan. Meskipun pemerintah daerah telah menginisiasi program-program peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan penyelenggaraan bursa kerja, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas program tersebut dalam mengurangi kemiskinan masih terbatas. Keterbatasan ini disebabkan oleh sifat pekerjaan yang bersifat sementara atau tidak menghasilkan layak yang membatasi dampak positif dari penurunan pengangguran terhadap penurunan kemiskinan secara signifikan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian [Sianturi \(2020\)](#) yang menjelaskan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan pada lima Kabupaten di Provinsi Riau yang mana t-hitung sebesar -0.591056 dan probabilitas sebesar $0.5574 > 0,05$ dan Koefisien regresi -0.0021 . Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, meskipun terdapat kecenderungan bahwa upah minimum memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan, pengaruhnya belum cukup kuat sehingga tidak signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan pada lima Kabupaten di Provinsi Riau. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah besaran upah minimum yang belum cukup tinggi untuk secara substansial mengangkat masyarakat miskin di atas garis kemiskinan. Dengan demikian, upah minimum yang diterima oleh pekerja tampaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian [Chairunnisa & Qintharah \(2022\)](#) yang menjelaskan bahwa upah minimum kota/kabupaten berpengaruh negatif pada kemiskinan. Nilai signifikansi sebesar $0,0205$, di mana nilai tersebut lebih besar dari $0,05$ atau 5% . Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian [Brito & Kerstenetzky \(2019\)](#) Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara tahun 2002 dan 2013, upah minimum berkontribusi terhadap penurunan proporsi penduduk miskin sebesar $38,2\%$ penurunan intensitas kemiskinan sebesar $39,4\%$, dan penurunan tingkat keparahan kemiskinan sebesar $40,6\%$.

Simpulan

Hasil penelitian mengenai pengaruh indeks pembangunan manusia, pengangguran dan upah minimum terhadap kemiskinan pada lima Kabupaten di Provinsi Riau sebagai berikut: 1) Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan pada lima Kabupaten di Provinsi Riau. 2) Pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan pada lima Kabupaten di Provinsi Riau. 3) Upah minimum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan pada lima Kabupaten di Provinsi Riau.

Daftar Pustaka

- Arifin, S. R. & Fadlan. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(1), 38-59
- Asnita, A., Harlen, & Aulia, A. F. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Modal Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 801-810
- Adiyadnya, M. S. P., & Swara, N. A. A. (2021). Pengaruh Tingkat Investasi, Nilai Tukar Rupiah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran. *Widya Manajemen*, 3(2), 107-116
- Algifari. (2021). *Pengolahan Data Panel untuk Penelitian Bisnis dan Ekonomi dengan Eviews 11*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2019). *Provinsi Riau Dalam Angka 2019*. BPS Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2020). *Provinsi Riau Dalam Angka 2020*. BPS Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2021). *Provinsi Riau Dalam Angka 2021*. BPS Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2022). *Provinsi Riau Dalam Angka 2022*. BPS Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2023). *Provinsi Riau Dalam Angka 2023*. BPS Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Brito, A. S., & Kerstenetzky, C. L. (2019). Has the minimum wage policy been important for reducing poverty in Brazil? A decomposition analysis for the period from 2002 to 2013. *Economia*, 200(1), 27-43.
- Chairunnisa, N. M., & Qintharah, Y. N. (2022). Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020. *Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi (PETA)*, 7(1), 147-161
- Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau (2024). Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
- Faizin, M. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 214-227
- Irandoust, M. (2023). Active Labor Market as an Instrument to Reduce Unemployment. *Journal of Government and Economics*, 9, 100065

- Leonita, L., & Sari, R. K. (2019). Pengaruh PDRB, pengangguran dan pembangunan manusia terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *ISOQUANT; Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 1-8.
- Muliza, Zulham, T., & Safarita, C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Perpektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51-69.
- Nurdiana, E. (2018). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Masyarakat Untuk Mengatasi Masalah Pengangguran Di Wilayah Kabupaten Cirebon. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(2), 16-25
- Novita, U. D., & Istiqamah, N. (2017). Pengaruh Pdrb, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sambas. *Jurnal Manajemen Motivasi*. 13(1), 815-820
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Rorong, I. P. F. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(3), 398-415
- Rianda, C. N. (2020). Analisis dampak pengangguran berpengaruh terhadap individual. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 17-26
- Simanjuntak, P. J. (2011). *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sari, L. P., Nurjannah, N., & Yovita., I. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2002-2021. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 567-574
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni., V. W. (2021). *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sianturi, V. G. (2020). Analisis Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2009-2017. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 202-208
- Winter, J. V. (2022). Minimum wages and restaurant employment for teens and adults in metropolitan and nonmetropolitan areas. *Journal of the Agricultural and Applied Economics Association*, 1(3), 254-269.
- Wahyudi, S. T. (2020). *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Winarno, W. W. (2017). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.